



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

REKOR	REKOR	ASS	SEKDA	WABUP
	8			

2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 119/PMK.02/2020 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

KEMAS (KEUANGAN)	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	11	1	

Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2020 nomor 446)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan Kabupaten.
3. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

KEMENTERIAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	g	/	h	

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Jabatan ASN adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c) Jabatan Administrator;
 - d) Jabatan Pengawas.
10. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
11. Unsur lainnya adalah pejabat instansi lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar.
12. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
15. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
16. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

KABUPATEN GORONTALO	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Pengikut adalah orang yang bukan ASN karena silat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
 21. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
 22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
 24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
 25. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
 26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
 27. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala OPD atau Plh. Kepala OPD kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
 28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.
 29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
 30. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

KEMENTERIAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

31. Uang representasi adalah tambahan biaya lumpsum harian.
32. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
33. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
34. Sewa kendaraan adalah sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati,
35. Biaya transportasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah.
36. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
37. Uang kontribusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada penyelenggara kegiatan sebagai kewajiban peserta untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara kegiatan.
38. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

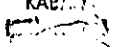



Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi:

- a. melaksanakan program dan tugas pemerintahan;
- b. memenuhi undangan dari pihak lain yang berkompeten dalam rangka protokoler kenegaraan, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan koordinasi, evaluasi dan penyamaan persepsi;
- c. melakukan konsultasi/koordinasi pada kementerian/lembaga/Pemda dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan/atau mengadakan study banding atau sebutan lain.

Pasal 3

Perjalanan dinas adalah pergerakan fisik:

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

KABUP	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. untuk melaksanakan penugasan;
- c. menggunakan satu atau beberapa moda transportasi;
- d. di tempat atau lokasi keberangkatan, lokasi tujuan, dan lokasi kembali;
- e. untuk suatu jangka waktu tertentu;
- f. telah ditetapkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali;
- g. tersedia dana dan kegiatannya berkesesuaian dengan tujuan penugasan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. azas umum;
- b. perencanaan penugasan;
- c. kewenangan;
- d. hak-hak keuangan;
- e. pembebanan belanja;
- f. pelaksanaan perjalanan dinas;
- g. pertanggungjawaban;

BAB III

AZAS UMUM

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan secara:
 - a. selektif;
 - b. tertib;
 - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. relevan
 - e. efektif;
 - f. ekonomis dan efisien;
 - g. bertanggungjawab.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.

KABUPATEN KE...	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	8	A	h	




- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi, serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Ekonomis dan Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa:
 - a. jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya yang menguntungkan; dan
 - c. jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas.

BAB IV

PERENCANAAN PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten, Staf ahli dan Pejabat Administrator (Kabag SETDA, Camat), membuat dan menandatangani telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju.
- (2) Pejabat Administrator selain yang dimaksudkan pada ayat (1), Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya, Unsur Lainnya dan pengikut Sebelum melaksanakan perjalanan dinas, membuat telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Jika Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beradaditempat/berhalangan, maka telaah perjalanan dinas ditandatangani oleh Plh pimpinan atau Asisten lingkup koordinasi.
- (4) Perjalanan dinas yang bersifat Konsultasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda, harus dilengkapi dengan surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh kepala OPD.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat Studi Banding atau sebutan lain pada Kementerian/Lembaga/Pemda, harus melampirkan surat persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang menjadi tujuan.
- (6) Telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayar (2) dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Dalam hal undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membutuhkan pendampingan atau dapat melakukan penambahan personil maka wajib membuat telaah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).
- (8) Apabila telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas disampaikan setelah pelaksanaan perjalanan dinas maka pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 7

Telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:

- a. dasar perencanaan penugasan;
- b. pemenuhan kriteria penugasan yang menjadi pertimbangan sehingga membutuhkan pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
- d. nama-nama yang akan mengikuti kegiatan; dan
- e. alasan menyertakan pejabat lainnya, unsur lainnya dan pengikut.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah paling lama 5 (lima) hari kalender untuk setiap penugasan sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum Kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah Kegiatan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	8	/	1	

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk setiap penugasan terkecuali untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat dan kegiatan reses DPRD.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah waktu tempuh perjalanan dan waktu melaksanakan kegiatan minimal membutuhkan waktu 8 (Delapan) jam;
- (4) Jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksana perjalanan dinas mengajukan telaah kepada penyetujui dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan teknis.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penugasan meminta dan/atau mengikutsertakan pejabat yang berasal dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten maka Sekretaris Daerah mengirimkan surat permintaan dan/atau pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten membuat SPT dan SPPD (SPPD Nihil) dengan catatan bahwa beban biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 10

Pengajuan telaah perjalanan dinas luar negeri harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. izin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri atau Sekretariat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. *passport* dinas bagi pejabat negara dan PNSD dan *passport* non dinas bagi non pejabat negara dan non PNSD;
- c. rencana kegiatan di luar negeri yang telah disampaikan ke Kedutaan atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang akan dikunjungi;
- d. visa dari negara-negara yang memberlakukan ijin visa sebelum kedatangan, kecuali negara yang menerapkan *visa on arrival*; dan
- e. ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

KABAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui pengajuan telaah untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah adalah Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, atau Plh Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat yang berwenang menyetujui telaah untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah luar kabupaten dalam rangka konsultasi/koordinasi/Studi Banding adalah Sekretaris Daerah; dan
- (4) Jika Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh Sekretaris Daerah yang terlebih dahulu dikonsultasikan atau dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD berwenang untuk menetapkan usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
- (2) Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebagai berikut:

- a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator;
- b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Unsur Lainnya dan pengikut;
- c. Jika pejabat yang menandatangani surat perintah tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b, tidak berada ditempat/berhalangan, maka yang menandatangani adalah pejabat satu tingkat dibawahnya atau Pelaksana harian dengan ketentuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pejabat lebih tinggi.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	y		y	

Pasal 14

- (1) Pejabat yang menandatangani SPPD perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan pejabat pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, unsur lainnya dan pengikut;
 - c. Jika Sekretaris Daerah tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah Plh Sekretaris Daerah dengan ketentuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat yang menandatangani SPPD perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, unsur lainnya Jika Sekretaris Daerah tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah Plh Sekretaris dengan ketentuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;

Pasal 15

- (1) (SPT) yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penomoran oleh bagian pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (2) Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penomoran oleh Bagian Umum.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		✓	

BAB VI
HAK-HAK KEUANGAN

Bagian Kesatu
umum

Pasal 16

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
- a. komponen belanja perjalanan dinas luar daerah:
 - 1. Uang harian;
 - 2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Biaya moda transportasi;
 - 4. Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Bupati/Wakil Bupati,
 - 5. Transport bandara dibayarkan secara lumpsom; dan
 - 6. Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 7. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/Swab Test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic Covid-19) yang dibuktikan dengan Kwuitansi/Struk/Nota.
 - b. Komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah:
 - 1. Uang harian;
 - 2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Biaya moda transportasi; dan
 - 4. Biaya akomodasi Dibayarkan rill.
- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung oleh pihak lain atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya tersebut tidak dibebankan dalam APBD.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		h	

- (3) Perjalanan dinas yang ditanggung seluruh komponennya oleh pihak lain maka diberikan uang harian dan akomodasi sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan termasuk representasi.
- (4) Setiap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di luar pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian Pejabat atas permintaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diberikan biaya perjalanan dinas pindah untuk pelantikan dan biaya pindah tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Uang Harian

Pasal 17

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Tarif uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Penugasan untuk mengikuti kursus LEMHANAS, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tingkat I, DIKLAT PIM Tingkat II atau DIKLAT PIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja, maka mulai hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagaimana terlampir pada lampiran I.

Bagian Ketiga

Representasi

Pasal 18

- (1) Biaya representasi dibayarkan secara lumpsom.
- (2) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Biaya representasi tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar negeri.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g	/	n	

Bagian Keempat
Moda Transportasi
Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Sulawesi yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional diberikan biaya bahan bakar minyak :
 - a. Perjalanan Ke Sulawesi Utara : 125 Liter
 - b. Perjalanan Ke Sulawesi Tengah : 200 Liter
 - c. Perjalanan Ke Sulawesi Barat : 250 Liter
 - d. Perjalanan Ke Sulawesi Selatan : 300 Liter
- (3) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara yang memberlakukan bagasi berbayar, dapat dibayarkan paling banyak 15 Kg, dibuktikan dengan tiket yang telah mencantumkan jumlah pembelian bagasi prabayar.
- (4) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi dan dalam daerah dalam kabupaten untuk satu kali kegiatan yang dibayarkan secara Lumsum dengan besaran sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk Bupati/ Wakil Bupati, diperkenankan menggunakan sewa kendaraan maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah, yang tidak bisa dilayani dengan kendaraan dinas, dalam bentuk rill Cost dengan batas biaya tertinggi Rp. 1.000.000 perhari.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas Operasional Sewa dapat memilih dibayarkan uang transport atau dibayarkan biaya bahan bakar minyak yang telah dialokasikan untuk kendaraan dinas tersebut.
- (7) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas luar daera dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III
- (8) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara menggunakan tiket kelas bisnis Selain Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah hanya dibayarkan 50% dari harga tiket riil.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓		✓	

Bagian Kelima

Biaya Transportasi Bandara/Pelabuhan/Stasiun

Pasal 20

- (1) Tarif biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan sebesar Rp. 240.000 dan dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan sebesar Rp 240.000;
 - b. dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tempat pelaksanaan sebesar Rp.240.000 dan dari tempat pelaksanaan kegiatan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan sebesar Rp 240.000; dan
 - c. dalam hal tempat pelaksanaan kegiatan memerlukan transportasi darat lanjutan maka dapat diberikan biaya secara riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dibayarkan jika perjalanan dinas menggunakan transportasi darat.
- (3) Biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumsum

Bagian Keenam

Akomodasi

Pasal 21

- (1) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas luar daerah tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini
- (2) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Jika biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka selisih lebih

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
γ	γ		γ	

tersebut tidak dibayarkan, sebaliknya apabila biaya riil tersebut dibawah dari standar biaya akomodasi maksimal maka selisih kurang tersebut tidak dapat ditagih.

- (5) Jika reservasi akomodasi melalui biro perjalanan atau sistem elektronik lainnya, maka bukti pembayaran yang digunakan adalah bukti yang dikeluarkan oleh biro perjalanan dan bukti pembayaran secara elektronik.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dari biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

PEMBEBANAN BELANJA

Pasal 22

- (1) Uang harian, biaya moda transportasi, akomodasi dan biaya representasi dibebankan pada obyek belanja perjalanan dinas dalam rincian obyek belanja baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya dibebankan pada obyek belanja jasa kantor dalam rincian obyek belanja jasa administrasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pembayaran Uang Muka

Pasal 23

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan SPT dan SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan setinggi-tingginya 75% dari perhitungan biaya perjalanan dinas.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	9		✓	

- (3) Sebelum pembayaran uang muka, Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan Sekertariat DPRD/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata Usaha UPTB/UPTD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Realisasi Perjalanan Dinas

Pasal 24

- (1) Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus melakukan per SPPD ditempat tujuan.
- (2) Visum SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan dan/atau petugas perusahaan, lembaga dan organisasi yang dikunjungi.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas.
- (2) Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.

Pasal 26

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		y	

Keuangan/Kepala Sub Bagian Verifikasi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata usaha:

- a. laporan perjalanan dinas harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas
- b. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat dan/atau petugas yang memvisum, serta pejabat dan/atau tugas yang memvisum;
- c. bukti akomodasi berupa bill hotel dan bukti Pembayaran elektronik ;
- d. jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf c untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- e. bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut *boarding pass* atau nota Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas/KDO-S untuk perjalanan dinas luar daerah;
- f. jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan *boarding pass* sebagaimana dimaksud huruf e tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh kepala OPD;
- g. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai fotokopi halaman passport atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
- h. Bukti moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah yang diajukan adalah tiket yang diterbitkan oleh perusahaan jasa penyewaan;
- i. bukti kegiatan berupa foto dan/atau video yang melakukan perjalanan dinas pada lokasi untuk perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- j. surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) sebagaimana pada Lampiran V(II).
- k. Untuk bukti pembayaran tiket dan hotel yang menggunakan internet Banking/SMS Banking wajib melampirkan rekening Koran sesuai tanggal transaksi

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 27

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan:

- a. meneliti kebenaran data-data dalam SPT dan SPPD;
- b. menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua);
- c. kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD; dan
- d. sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran.

Pasal 28

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membuat:
 - a. kuitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;
 - b. perhitungan rampung; dan
 - c. membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal perjalanan dibatalkan maka terhadap biaya tiket tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:
 - a. telaah yang telah disetujui;
 - b. SPT;
 - c. SPPD;
 - d. Tiket; dan
 - e. surat keterangan pembatalan dari yang menandatangani SPT.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓		g	

- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal perjalanan mengalami perubahan jadwal keberangkatan/kepulangan maka terhadap selisih biaya tiket tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti pembayaran selisih harga tiket.

Pasal 31

- (1) Untuk perjalanan dinas yang harus dilakukan transit karena tidak terdapat penerbangan langsung dari dan ke tempat keberangkatan atau ke tempat tujuan pada hari yang sama, maka diberikan biaya penginapan.
- (2) Untuk diberikan biaya penginapan maka di dalam dokumen perencanaan, SPT dan SPPD harus mencantumkan tujuan transit dan tujuan akhir.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan sebelum peraturan bupati ini berlaku tetap dianggap sah sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 2 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		1	

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 2 MARET 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 2 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

RIDWAN YASIN, SH., MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR...⁴⁵²

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		9	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 Maret 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

TARIF UANG HARIAN

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00		Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00		Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00		Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00		Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00		Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
20.	KALIMANTANBARAT	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00		Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
32.	MALUKUUTARA	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00		Rp 170.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	✓	1	

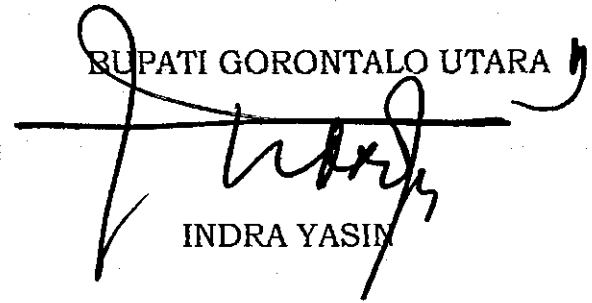
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
-----	-------------	----	---------------	---------------

b. Uang Harian Kegiatan Atau Pertemuan Diluar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DIDALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12.	JAWABARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17.	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
-----	-------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✗	✗	h	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUARKOTA	DALAMKOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Fasilitas Moda Transportasi

NO	PEJABAT PELAKSAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	BUPATI/WAKIL BUATI/PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	BISNIS	VIP	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	EKONOMI	KELAS I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	PEJABAT ADMINISTRATOR/GOL IV/UNSUR LAINNYA	EKONOMI	KELAS I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PEJABAT PENGAWAS/GOL III	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	GOLONGAN I/II/PENGIKUT	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	X	✓	h	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

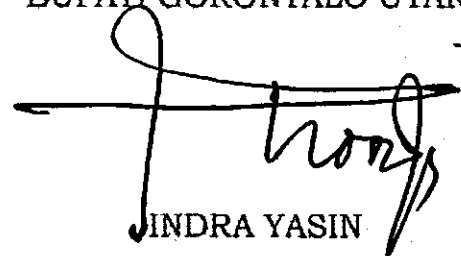
1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
-1	-2	-3	-4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	///	u	

30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	X	/	h	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

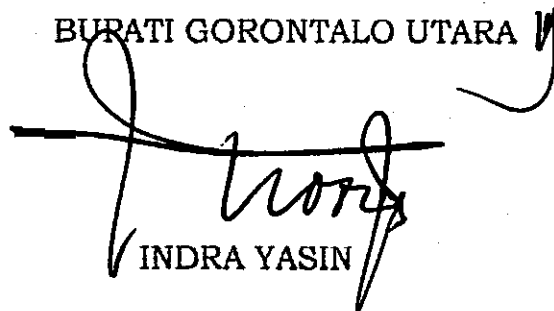
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN GORONTALO UTARA
KE KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN ASAL	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. GORONTALO	ORANG/PP	250.000
2	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BONE BOLANGO	ORANG/PP	375.000
3	KAB. GORONTALO UTARA	KOTA GORONTALO	ORANG/PP	350.000
4	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BOALEMO	ORANG/PP	400.000
5	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. POHUWATO	ORANG/PP	650.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KECAMATAN DI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	TEMPAT ASAL	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	KWANDANG	TOLINGGULA/BIAU	ORANG/PP	200.000
2	KWANDANG	SAUMALATA/SUMALATA TIMUR/ATINGGOLA	ORANG/PP	150.000
3	KWANDANG	MONANO/GENTUMA	ORANG/PP	125.000
4	KWANDANG	ANGGREK/PONELO/TOMILITO	ORANG/PP	100.000

BURATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

LAMPIRAN VI. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

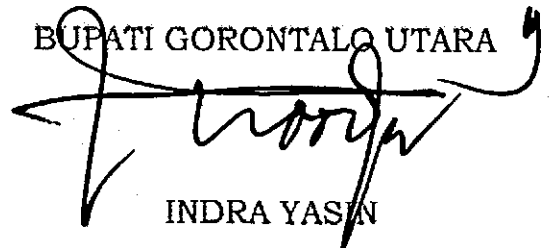
BIAYA AKOMODASI LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/ II/ NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGGULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

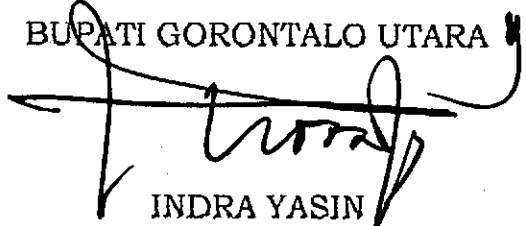
TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BIAYA AKOMODASI DALAM DAERAH

NO	KAB/KOTA	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ESELON II/ANGGOTA DPRD	ESSELON III/GOL IV	ESSELON IV/STAF
1	KAB. GORONTALO	OH	-			
2	KAB. BONE BOLANGO	OH	-			
3	KOTA GORONTALO	OH	1.100.000	900.000	700.000	400.000
4	KAB. BOALEMO	OH	1.000.000	900.000	750.000	400.000
5	KAB. POHUWATO	OH	1.100.000	900.000	800.000	400.000

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	✓	h	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

FORMAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama.....hari dari tanggals/d.....dengan tujuantidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati nomor Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar.....(.....hari X Rp.....kali 30%)

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalana dinas.

Kwandang,

2021

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	✓	✓	